



Incar Kenaikan Angka Peserta, BPJS Ketenagakerjaan Fokus Sasar Pekerja Informal

YOGYA, TRIBUN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta mengincar capaian kepesertaan di DIY meningkat 10 persen tahun ini.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Rudi Susanto, mengatakan, pada tahun 2023 lalu capaian kepesertaan di DIY masih 35 persen. Dengan target peningkatan 10 persen di tahun 2024 ini, diharapkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DIY bisa mencapai 45 persen.

"Untuk tahun 2024 ini, kami fokuskan di ekosistem desa, ekosistem pasar, ekosistem *e-commerce*, dan UMKM. Termasuk pendekatan kepatuhan," katanya, Kamis (22/2).

Ia menyebut ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan capaian kepesertaan. Tantangan pertama ialah pembayaran. Menurut dia, meskipun iuran paling rendah ialah Rp16.800, namun ada pekerja rentan yang belum bisa melakukan pembayaran.

Tantangan kedua berkaitan dengan kesadaran, terutama bagi pekerja informal. Sama seperti asuransi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bisa berjalan ketika terjadi kecelakaan kerja. "Pekerja merasa belum jadi kebutuhan. Karena seperti proses asuransi, kalo terjadi risiko perlindungannya berjalan. Kesadaran pekerja masih kurang, sehingga ini menjadi tantangan besar,"

terangnya.

Untuk itu, pihaknya bakal menggandeng pemerintah agar bisa mendorong dari sisi regulasi pekerja rentan. "Contohnya di Kota Yogyakarta yang mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pekerja perangkat desa RT dan RW. Ini bisa terjadi karena regulasi, sehingga ke depan kami menggandeng pemerintah," lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal masif melakukan sosialisasi bersama *stakeholder* lain. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui manfaat paripurna BPJS Ketenagakerjaan.

Kabid Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Ahmad Athobary, menambahkan, tahun ini pihaknya lebih fokus pada pekerja informal, seperti tukang becak, tukang ojek, nelayan, petani, pedagang, dan lainnya. Hingga Februari 2024, baru 12,6 persen pekerja informal yang terproteksi BPJS Ketenagakerjaan. Baru sekitar 86.607 pekerja dari total 687.000 angkatan kerja di sektor informal.

"Ke depan, kami fokus ke program pekerja informal atau bukan penerima upah, karena lebih rentan terkena sosial ekonomi ketika berhenti bekerja. Kami akan gandeng semua *stakeholder* untuk sama-sama meningkat capaian kepesertaan, sehingga manfaat perlindungan ini bisa dirasakan semua lapisan masyarakat," pungkasnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005